

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi laba perusahaan merupakan salah satu informasi terpenting bagi investor. Investor memerlukan informasi laba untuk menentukan risiko ekuitas (Jin and Myers 2006) dan *required rate of return* (Hutton, Marcus, and Tehranian 2018) dalam proses pengambilan keputusan. Informasi laba juga dibutuhkan oleh investor untuk menilai kinerja manajer perusahaan, yang pada akhirnya berkaitan dengan biaya keagenan dan biaya ekuitas perusahaan (Bushman and Smith 2001). Lalu bagaimana jika perusahaan melaporkan laba yang telah dimanipulasi (*earnings management*)? Maka investor mengambil keputusan berdasarkan angka laba yang buram.

Laba yang buram¹ adalah laporan laba yang tidak mampu menjelaskan kondisi laba ekonomis perusahaan yang sesungguhnya (Bhattacharya, Welker & Thornton, 2003), yang dengan sengaja dibuat oleh manajemen (*insider*) dengan tujuan untuk membatasi informasi serta perhatian partisipan pasar (Anderson, Duru, & Reeb, 2009). Konsep keburaman laba ini selaras dengan manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan pertimbangan (*judgement*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan agar dapat menyesatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Healy and Wahlen 1999). Dengan kata lain, *earnings management*

¹ Semakin buram laba perusahaan berarti semakin banyak jumlah informasi yang disembunyikan (Jin and Myers 2006). Hal ini akan melemahkan hubungan antara laba akuntansi yang dilaporkan dengan laba akuntansi ekonomis, sehingga meningkatkan asimetri informasi (Bushman & Smith, 2001).

menghasilkan laporan keuangan yang mengandung laba yang buram (Caprio, Faccio, & McConnell, 2013; Smith, 2016; Jiang, Hu, Zhang & Zhou, 2018).

Tingkat keburaman laba perusahaan di Indonesia termasuk dalam kategori yang tinggi. Hal ini dapat dijelaskan dengan: pertama, *Earning Opacity Index* (EOI) atau indeks keburaman laba, Indonesia menempati peringkat 32 dari 34 negara (Bhattacharya, Welker & Thornton, 2003). Kedua, EOI oleh Kurtzman (2004), Indonesia menempati peringkat ke 48 dari 48 negara. Ketiga, EOI menurut Milken Institute (2009), Indonesia menempati peringkat ke 35 dari 48 negara. Keempat, *financial reporting quality index*², Indonesia menempati peringkat ke 36 dari 38 negara (Tang & Chen, 2016).

Mengapa perusahaan melakukan manajemen laba? Terdapat berbagai faktor yang memotivasi manajer melakukan *earnings management* dan salah satunya adalah faktor politik. Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba ketika dibawah tekanan politik (Diri, 2018). *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan besar³ cenderung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis pemerintah, seperti regulasi, subsidi, pajak dan lainnya (Watts & Zimmerman, 1978).

Resource dependence theory menyatakan bahwa perusahaan merupakan sebuah *open system* yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang penuh dengan ketidakpastian. Cara meminimalisir ketidakpastian eksternal tersebut adalah dengan membangun koneksi politik (Pfeffer and Salancik 2003). Bahkan ketika pasar tidak berjalan baik dari sisi perusahaan, seperti; regulasi, pajak, perlindungan usaha dan

² *Financial Reporting Quality Index* (FRQI) diteliti pada 38 negara dengan menggunakan data periode 2000 – 2014. FRQI terdiri dari 6 indikator yaitu, *loss avoidance*, *profit decline avoidance ratio*, *accruals ratio*, *qualified audit opinion ratio*, *non-big 4 auditor ratio*, *audit fee ratio*.

³ Ukuran perusahaan merupakan proksi untuk variabel *political attention* atau sorotan politik (Watts & Zimmerman, 1978).

hukum yang minim, perusahaan dapat bergantung pada koneksi politik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Li, Meng, and Zhang 2006). Koneksi politik juga dapat membantu perusahaan dalam memperoleh sumber daya penting yang dikuasai negara (Pfeffer & Salancik, 2003; Hillman, Withers, & Collins, 2014).

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa, untuk meminimalkan biaya politik akibat ketidakpastian lingkungan eksternal (seperti kebijakan politis pemerintah) serta agar dapat memperoleh berbagai keuntungan, perusahaan membangun koneksi politik⁴. Hal serupa dibuktikan oleh berbagai penelitian terdahulu yang menemukan bahwa koneksi politik memberikan beragam keuntungan bagi perusahaan, diantaranya: akses prioritas atas pinjaman (Jhonson & Mitton, 2003; Cull & Xu; Khwaja & Mian, 2005; Leuz & Oberholzer-gee, 2006); pinjaman atau *cost of debt* yang murah (Faccio, 2002; Ming, 2018); akses prioritas dalam perolehan kontrak kerja pemerintah (Agrawal & Knoeber, 2001; Goldman, Rocholl, & So, 2008); akses prioritas untuk diberikan bantuan keuangan ketika akan mengalami kebangkrutan atau *bail out* (Faccio, Masullis, & McConnel, 2006); pembayaran pajak yang lebih rendah (Adhikari, Derashis, & Zhang, 2006; Sudibyoy & Jianfu, 2016); pengenaan denda yang lebih rendah dari *securities exchange commission* ketika perusahaan melakukan pelanggaran (Correia 2014), dan probabilitas 38% lebih kecil untuk terdeteksi melakukan kecurangan oleh regulator, serta memiliki waktu 117 hari lebih lama daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik sebelum terdeteksi melakukan kecurangan (Yu & Yu, 2011).

Koneksi antara politisi dan bisnis (perusahaan) dipicu oleh adanya ‘saling membutuhkan dan saling menguntungkan’. Dari sisi politisi, mereka memperoleh

⁴ Koneksi antara politisi dan bisnis (perusahaan) dipicu oleh adanya ‘saling membutuhkan’ dari kedua belah pihak. Dari sisi politisi, mereka membutuhkan dukungan dari perusahaan untuk mencapai tujuan politik dan sosio-ekonomis (Shleifer & Vishny 1994). Politisi membutuhkan sumber daya untuk mendukung kampanye atau penggalangan dana selama masa pemilihan (Miettinen & Poutvaara 2014) dan untuk menstabilkan rezim dan serta mempertahankan kekuasannya (Choi & Thum 2009).

rente berupa suap, suara, kontribusi dana kampanye (Morck, Stangeland & Yeung 2000; Hellman, Jones & Kaufman; Svensson, 2003; Bushman, Piotroski, & Smith, 2004; Cull & Xu, 2005) dan penyerapan tenaga kerja secara berlebihan (Bertrand, Kramarz, Schoar, & Thesmar, 2018). Perusahaan membutuhkan politisi untuk memperoleh keuntungan dan politisi membutuhkan perusahaan untuk mendapatkan rente. Hubungan saling menguntungkan dan membutuhkan antara politisi bisnis (perusahaan) ini lazim dikenal dengan *rent seeking activities* (aktivitas perburuan rente).

Keuntungan dan rente dari aktivitas *rent seeking* harus disembunyikan dari pihak luar (Braam, Nandy, Weitzel, & Lodh, 2015). Terdapat dua alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penyembunyian informasi. Pertama, perusahaan harus ‘melindungi’ pejabat politik yang telah ‘membantu’ perusahaan (Srinidhi, Zhang, & Zhang, 2010). Dari sisi politisi, pejabat yang terlibat akan menekan perusahaan untuk menyembunyikan segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas *rent seeking* yang telah dilakukan (Bushman, Piotroski, & Smith 2004). Kedua, perusahaan harus menyembunyikan keuntungan yang diperoleh dari koneksi politik sehingga dapat terhindar dari publisitas negatif sekaligus terhindar dari kewajiban-kewajiban yang muncul dari pihak ketiga, seperti perusahaan pesaing dan media, terkait kewajaran dan keabsahan keuntungan yang diperoleh (Srinidhi, Zhang, & Zhang, 2010).

Cara yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan informasi tersebut adalah *earnings management* (Chaney, Faccio, & Parsley, 2011; Braam, Nandy, Weitzel, & Lodh, 2015; Chi, Liao & Chen, 2016; Liu, Lin, Chan & Fung, 2018; Hashmi, Brahmana & Lau, 2018). Dengan melakukan *earnings management* maka laporan keuangan perusahaan akan menjadi buram (*opaque*) sehingga dapat membuat perusahaan terhindar dari perhatian dan kecurigaan publik. Dengan meminjam logika

dari *theory of self-preservation* (Karni & Schmeidler, 1986), *earnings management* merupakan realisasi dari proses perlindungan diri bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik terkait aktivitas *rent seeking* yang telah dilakukan (Liu, Lin, Chan & Fung, 2018).

Kapan perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik? Pertama, apabila CEO, direksi, komisaris atau pemegang saham perusahaan memiliki kedekatan dengan presiden dan keluarganya (Fisman, 2001; Jhonson & Mitton, 2003; Leuz & Oberholzer-gee, 2006). Kedua, apabila direksi, komisaris atau pemegang saham perusahaan merupakan anggota partai politik (Goldman, Rocholl, & So, 2008; Li, Meng, Wang, & Zhou, 2008). Ketiga, apabila direksi atau komisaris perusahaan merupakan pejabat pemerintah yang sedang menjabat atau pernah menjabat (Nys, Tarazi, & Trinugroho, 2013; Bertrand, Kramarz, Schoar, & Thesmar, 2018). Keempat, apabila perusahaan memberikan kontribusi keuangan kepada partai politik (Ferguson and Voth 2008) atau memiliki *lobbying expenditure* terhadap pemerintah (Sobel and Graefe-Anderson 2014). Kelima, apabila salah satu petinggi perusahaan atau pemegang saham (memiliki hak suara lebih besar dari 10%) merupakan anggota parlemen, menteri dan keluarga menteri, memiliki hubungan dekat dengan politisi dan/atau memiliki hubungan dekat dengan politisi dari negara lain (Faccio, 2006).

Definisi Faccio (2006) banyak digunakan dalam penelitian koneksi politik di berbagai negara (Dombrovsky, 2008 di Latvia; Gapolthage, 2013 di Sri Lanka; Pérez, Sánchez, & Martín, 2014 di Spanyol; Khan, Arifur, Mihret, Dessalegn, & Mohammad, 2016 di Bangladesh; Ming et al, 2018 di Malaysia), termasuk di Indonesia (Raharja, 2013; Butje & Tjondro, 2014; Muhammadi, 2016; Harrymawan & Nowland, 2016; Ariningrum & Diyanty, 2017; Habib, Muhammad, & Jiang, 2017; Harrymawan, 2018). Alasannya adalah karena definisi tersebut dapat menangkap

lebih banyak koneksi politik dengan mengambil cakupan koneksi dari berbagai sisi (pemerintahan, parlemen, kedekatan pertemanan dan keluarga).

Definisi koneksi politik dalam penelitian ini merujuk pada Faccio (2006) modifikasi. Modifikasi pertama, dari sisi *board*, karena Indonesia menganut *two-tier board system* yakni dewan direksi dan dewan komisaris yang terpisah. Modifikasi kedua, penelitian ini tidak mencakup definisi hubungan dekat (pertemanan) dan anggota keluarga (pasangan, anak, cucu, saudara kandung dan mertua) karena faktor keterbatasan data. Dengan demikian, definisi koneksi politik dalam penelitian ini menjadi: apabila salah satu pemegang saham terbesar (minimal 10% dari hak suara) atau salah satu dari pejabat tinggi perusahaan (CEO, komisaris, direksi) merupakan pejabat pemerintah (presiden, menteri, yang sedang atau pernah menjabat), mantan petinggi Polri dan atau TNI, dan atau anggota parlemen (sedang atau pernah menjabat).

Penelitian terdahulu di Indonesia mengategorikan koneksi politik menjadi koneksi pemerintah, koneksi militer, koneksi parlemen dan koneksi Soeharto (Faccio 2006; Raharja, 2013; Butje & Tjondro, 2014; Harrymawan & Nowland, 2016; Harrymawan, 2016; Muhammadi, 2016; Habib, Muhammadi, & Jiang, 2017; Ariningrum & Diyanty, 2017). Setelah menelaah 2,140 emiten dalam 5 tahun periode pengamatan, peneliti menemukan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki dua bahkan tiga jenis koneksi politik di saat yang bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini mengategorikan koneksi politik menjadi tujuh tipe yaitu tipe 1 (koneksi militer), tipe 2 (koneksi pemerintah), tipe 3 (parlemen), tipe 4 (militer & pemerintah), tipe 5 (militer & parlemen), tipe 6 (pemerintah & parlemen) dan tipe 7 (militer, pemerintah & parlemen).

Dari diskusi diatas dapat diketahui bahwa koneksi politik memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan dan mendatangkan rente bagi politisi. Informasi yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan dan rente politisi tersebut harus disembunyikan dari pihak luar, salah satunya dengan *accrual-based earnings management*. Hal ini akan membuat perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang mengandung laba yang buram (*opaque*) sehingga perusahaan dapat terhindar dari publisitas negative dan sorotan publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih cenderung untuk melakukan *accrual-based earnings management* daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Namun demikian, terdapat dua kelompok hasil penelitian terdahulu yang bertentangan dengan premis tersebut. Kelompok pertama menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara koneksi politik dengan *discretionary accruals* (Chaney, Faccio & Parsley, 2011; Wang et al, 2017; Hasmi, Brahmana & Lau, 2018). Kelompok kedua menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara koneksi politik dengan *discretionary accruals* (Chi, Liao, & Chen 2016). Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk meneliti perbedaan *earnings management* antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, disamping fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki perusahaan dengan koneksi politik terbanyak di dunia (Faccio, 2006).

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Sejalan dengan hasil penelitian koneksi politik yang dilakukan di negara luar, perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia juga memperoleh berbagai keuntungan. Perusahaan yang memiliki koneksi politik relatif mudah dalam

mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah, seperti kasus kredit macet yang terjadi pada awal tahun 1990 yakni *Golden Key Grup* (GKG), yang bergerak di sektor manufaktur dan pengolahan kimia. GKG memperoleh pinjaman tanpa jaminan sebesar US\$430 Juta dari bank milik pemerintah, yaitu Bank Pembangunan Indonesia. Dalam proses peradilan terungkap bahwa Hutomo Mandala Putra, yang merupakan putra bungsu Presiden Soeharto adalah investor awal GKG yang telah memperkenalkan manajemen perusahaan kepada pejabat bank yang kemudian menyetujui pinjaman tersebut dalam waktu yang sangat singkat (McBeth, 1994 dalam Leuz & Oberholzer-Gee 2006). Kemudian kasus Barito Grup milik Pradjogo Pangestu. Barito Grup menerima pinjaman dari bank pemerintah dalam jumlah yang begitu besar beberapa saat sebelum terjadinya krisis keuangan (Borsuk, 1993 dalam Muhammadi, 2016).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik di Indonesia kemudian lebih memilih sumber pendanaan (via surat hutang dan saham) di pasar domestik daripada pasar modal global. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan koneksi politik dapat memperoleh pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bank pemerintah tanpa perlu menyediakan laporan keuangan yang transparan seperti yang disyaratkan oleh pasar modal global (Leuz and Oberholzer-gee 2006). Kondisi serupa juga ditemukan oleh Harrymawan (2016) yakni perusahaan dengan koneksi politik tipe militer mendapatkan suku bunga atas pinjaman yang lebih rendah daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi militer.

Perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia juga memperoleh keuntungan berupa *cash effective tax rate* yang lebih rendah daripada perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik, artinya koneksi politik mengakomodir aktivitas penghindaran pajak (Sudiby and Jianfu 2016). Dengan koneksi politik, perusahaan

manufaktur di Indonesia memiliki probabilitas tiga kali lebih besar daripada perusahaan pesaing yang tidak memiliki koneksi politik dalam hal mendapatkan izin impor bahan baku dan makanan tertentu. Probabilitas tersebut kemudian meningkat menjadi empat kali lipat apabila perusahaan memiliki anggota keluarga Presiden Soeharto di dalam susunan dewan komisaris atau dewan direksi (Mobarak & Purbasari 2006).

Semua keuntungan dan biaya terkait koneksi politik dan *aktivitas rent seeking* tersebut harus disembunyikan untuk ‘melindungi’ pejabat terkait sekaligus menjaga reputasi perusahaan. Cara untuk menyembunyikan informasi-informasi tersebut adalah dengan melakukan *earnings management* agar laporan keuangan yang dilaporkan menjadi buram (*opaque*) dan perusahaan terhindar dari perhatian, monitoring publik dan sorotan politik yang berlebihan. Bahkan, perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia cenderung menggunakan jasa KAP *Non-Big 4* (Muhammadi, 2016) agar aktivitas *rent seeking* yang dilakukan dapat berjalan lancar tanpa ketahuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan *earnings management* daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Namun demikian, sepengetahuan penulis terdapat dua hasil penelitian yang bertentangan perihal koneksi politik dan *earnings management*. Berdasarkan hal tersebut maka **masalah pertama** yang diteliti adalah apakah perusahaan dengan koneksi politik di Indonesia memiliki tingkat *discretionary accruals* yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik?

Penelitian ini mengategorikan koneksi politik menjadi tujuh tipe. Setiap tipe koneksi politik tersebut memiliki keunikan dan mekanisme kekuatan politik yang belum tentu sama. Penulis menduga bahwa masing-masing tipe koneksi politik akan

memberikan kekuatan dorongan yang belum tentu sama bagi perusahaan untuk melakukan *accrual-based earnings management*. Dengan demikian **masalah ke dua** yang diteliti adalah apakah terdapat perbedaan nilai *discretionary accruals* antara perusahaan dengan koneksi politik tipe 1 (militer), tipe 2 (pemerintah), tipe 3 (parlemen), tipe 4 (militer & pemerintah), tipe 5 (militer & parlemen), tipe 6 (pemerintah & parlemen) dan tipe 7 (militer, pemerintah & parlemen)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, untuk menguji perbedaan tingkat *accrual-based earnings management* antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Penulis menemukan bahwa terdapat tujuh tipe koneksi politik di Indonesia. Masing-masing tipe koneksi politik tersebut memiliki mekanisme yang belum tentu sama dalam memberikan ‘manfaat’ kepada perusahaan, sehingga nominal keuntungan yang diperoleh dari koneksi yang dimiliki belum tentu sama. Dengan demikian, penulis menduga bahwa masing-masing tipe koneksi politik yang ada akan memberikan kekuatan dorongan yang belum tentu sama bagi perusahaan untuk melakukan *accrual-based earnings management*. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat *discretionary accruals* antara perusahaan yang memiliki koneksi politik tipe 1 (militer), tipe 2 (pemerintah), tipe 3 (parlemen), tipe 4 (militer & pemerintah), tipe 5 (militer & parlemen), tipe 6 (pemerintah & parlemen) dan tipe 7 (militer, pemerintah & parlemen).

D. Kontribusi Penelitian

Pada *Corruption Perception Index* Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara. Peringkat ini menggambarkan bahwa Indonesia termasuk negara yang korup (*Transparency International* 2019)⁵. Lingkungan politik yang korup meningkatkan probabilitas politisi yang memiliki koneksi dengan perusahaan untuk mengambil rente karena telah bertindak untuk kepentingan perusahaan tersebut (Ang, Ding, & Thong 2013). Perusahaan menjalin koneksi politik demi kelangsungan usaha serta perolehan sumber daya di masa yang akan datang (Pfeffer & Salancik 2003). Hubungan yang saling menguntungkan antara politisi dan bisnis (perusahaan) ini lazim dikenal dengan nama aktivitas perburuan rente (*rent seeking activities*).

Keuntungan perusahaan dan rente terkait aktivitas perburuan rente ini harus disembunyikan untuk ‘melindungi’ politisi terkait sekaligus menjaga reputasi perusahaan. Cara yang dapat dilakukan adalah *accrual-based earnings management*. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan *accrual-based earnings management* daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

Penelitian terdahulu yang menguji hubungan antara koneksi politik dengan *accrual-based earnings management* menemukan hasil yang bertentangan. Hasil pertama menemukan terdapat hubungan positif diantara keduanya (Chaney, Faccio & Parsley, 2011; Wang et al, 2017; Hasmi, Brahmna & Lau, 2018), sedangkan hasil kedua menemukan hubungan negatif diantara keduanya (Chi, Liao & Chen, 2016). Dari sisi empiris penelitian ini memberikan bukti perbedaan nilai *discretionary accruals* antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

⁵ Indonesia menempati peringkat 89 dari 180 negara peserta, dengan skor 38 dari 100. Skor mulai dari 0 yang berarti sangat korup, skor 100 berarti sangat bersih (*Transparency International* 2019).

Kontribusi empiris yang lain adalah dari tipe koneksi politik yang diuji dalam penelitian ini. Di dalam berbagai penelitian terdahulu, koneksi politik diuji dalam dalam tipe koneksi pemerintah, koneksi militer, koneksi parlemen, koneksi Soeharto atau bahkan tidak mengategorikan (Raharja, 2013; Butje & Tjondro, 2014; Harrymawan 2016; Harrymawan & Nowland, 2016; Muhammadi, 2016; Habib, Muhammadi, & Jiang, 2017; Ariningrum & Diyanty, 2017). Penelitian ini mengategorikan koneksi politik menjadi tujuh tipe yang merupakan pengembangan dari tiga jenis koneksi politik yang ada yaitu koneksi militer, pemerintah dan parlemen. Penulis menemukan bahwa ada perusahaan di Indonesia yang memiliki dua bahkan tiga jenis koneksi politik disaat yang bersamaan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai literatur di dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan kerangka pemikiran sesuai dengan teori yang relevan yang diakhiri dengan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hal-hal mengenai hasil dan analisis dari penelitian yang berisi statistik deskriptif, uji asumsi statistik, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penelitian yang menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

